

**PERAN WOMEN PEACEKEEPERS DALAM PENYELESAIAN *SEXUAL EXPLOITATION ABUSE (SEA)* DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO**

**(SKRIPSI)**

**Oleh**

**Ninda Mirantama  
(1746071003)**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **Peran *Women Peacekeepers* Dalam Penyelesaian *Sexual Exploitation Abuse* (SEA) Di Republik Demokratik Kongo**

Oleh

**Ninda Mirantama**

*Sexual Exploitation Abuse* (SEA) merupakan isu yang marak terjadi di dalam operasi perdamaian, bertolak belakang dari mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi dan menciptakan perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran *women peacekeepers* sebagai salah satu alat perdamaian PBB dalam penyelesaian SEA di Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini dijelaskan menggunakan teori feminis liberal, teori jejaring kelembagaan, dan maskulinitas militer dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data kajian pustaka melalui dokumen dari situs resmi PBB, jurnal dan berita elektronik.

Penelitian ini menemukan bahwa: (1) salah satu faktor utama terjadinya isu SEA adalah melekatnya maskulinitas militer dalam operasi perdamaian yang disalahgunakan untuk mencapai tujuan seksual; (2) peran *women peacekeepers* memberikan hasil yang positif dalam menangani dan mengurangi isu SEA melalui tugas *civilian peacekeepers*. *Women peacekeepers* efektif menekan tindakan maskulinitas militer diantara *male peacekeepers* yang ditekankan pada kebijakan ramah gender, yaitu *zero tolerance policy*; (3) melalui kerjasama dengan beberapa NGO *women peacekeepers* dapat berpartisipasi lebih besar melalui pendidikan, kesenian, dan teknologi, tetapi perlu adanya peningkatan dalam pemberdayaan *women peacekeepers* berdasarkan mandat di bawah program-program PBB secara keseluruhan.

**Kata kunci :** Perserikatan Bangsa-Bangsa, *sexual exploitation abuse*, *women peacekeepers*.

## **ABSTRACT**

### **The Role of Women Peacekeepers in Resolving Sexual Exploitation Abuse (SEA) in the Democratic Republic of the Congo**

**By**

**Ninda Mirantama**

Sexual Exploitation Abuse (SEA) is a rife issue in peace operations, contrary to the mandate of the United Nations (UN) to protect and create peace. This study aims to examine the role of women peacekeepers as one of the UN peacekeeping tools in resolving the SEA in the Democratic Republic of the Congo. This research is explained using liberal feminist theory, institutional network theory, and military masculinity using qualitative methods with literature review data collection techniques through documents from the UN official website, journals and electronic news. This study found that: (1) one of the main factors to the occurrence of SEA issues was the attachment of military masculinity in peace operations which was misused to achieve sexual purposes; (2) the role of women peacekeepers gives positive results in handling and reducing SEA issues through the duties of civilian peacekeepers. Women peacekeepers are effective in suppressing acts of military masculinity among male peacekeepers which emphasize gender-friendly policies, called the zero tolerance policy; (3) through collaboration with several NGOs, women peacekeepers can participate more through education, arts, and technology, but it is necessary to increase the empowerment of women peacekeepers based on the mandate under the UN programs as a whole.

**Keywords :** **United Nations, *sexual exploitation abuse, women peacekeepers.***

**PERAN *WOMEN PEACEKEEPERS* DALAM PENYELESAIAN *SEXUAL EXPLOITATION ABUSE (SEA)* DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO**

**Oleh**

**Ninda Mirantama**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PERAN *WOMEN PEACEKEEPERS* DALAM  
PENYELESAIAN *SEXUAL EXPLOITATION  
ABUSE* (SEA) DI REPUBLIK DEMOKRATIK  
KONGO**

Nama Mahasiswa : **Ninda Mirantama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1746071003**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 19600416 198603 2 002

  
**Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**  
NIP. 231602880717201

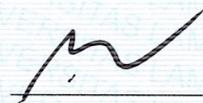
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 19600416 198603 2 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

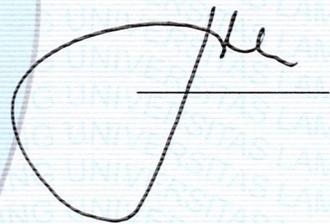
Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Maret 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Maret 2022  
Yang membuat pernyataan,



Ninda Mirantama  
1746071003

## RIWAYAT HIDUP



Ninda Mirantama adalah nama penulis dari skripsi ini. Penulis lahir pada tanggal 10 Juni 1999, anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Beny Edy**” dan Bunda “**Ida Badrie**”. Penulis memulai pendidikan formal di SD Kartika II-5 (PERSIT) Bandar Lampung pada tahun 2005 dan tamat pada 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP-IT Arraihan dan tamat pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA-YP Unila Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017, penulis melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Lampung dengan program studi Hubungan Internasional.

Selama masa perkuliahan penulis telah memperoleh banyak pengalaman sekaligus prestasi. Penulis merupakan *3<sup>rd</sup> Winner of speech competition Darma Jaya English Club 2019*, *International Relations student of the year 2019*, Perwakilan Hubungan Internasional Universitas Lampung dalam PNMHII (Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional) pada divisi *Short Diplomatic Course* serta presenter pada *International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies 2021* dan menyelesaikan PKL (Program Kerja Lapangan) di KBRI Vientiane, Laos pada tahun 2020.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap penulisan ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “*Peran Women Peacekeepers dalam Penyelesaian Sexual Exploitation Abuse (SEA) di Republik Demokratik Kongo*”.

## **MOTTO**

“There are no traffic jams along the extra mile”

-Ninda Mirantama

“Seek help through patience and prayer. Surely, Allah is with those who are patient”.

-Quran 2:45

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini penulis persembahkan kepada :**

Allah SWT pencipta semesta dan seisinya yang telah memberikan hidup dan berkah, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Diriku sendiri yang telah belajar dengan giat selama mengejar ilmu di perguruan tinggi dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas akhirnya.

Manusia teristimewa, kedua orang tua ku mama ida dan papa beni kalian alanku untuk pantang menyerah dan menyelesaikan skripsi ini.

Adik kecilku tercinta Fernanda M. Adhia yang selalu bangga terhadapku.

Terima kasih...

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran women peacekeepers dalam penyelesaian *Sexual Exploitation Abuse* (SEA) di Republik Demokratik Kongo”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung sekaligus pembimbing utama penulis, terima kasih penulis ucapkan untuk madame ari, semoga ilmu yang di berikan menjadi berkah di hidupnya.
3. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A. Selaku dosen pembimbing kedua, sosok luar biasa yang penulis kagumi dan syukuri kehadirannya, terimakasih penulis ucapkan kepada yunda Fitri yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, dan pengertian. Nasihat, ilmu, sekaligus pengalaman yunda telah berperan besar dalam menjadikan penulis pribadi yang lebih baik dan terselesaikannya skripsi ini, semoga kebaikan dan berkah selalu menyertai yunda
4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku dosen pembahas. Penulis ingin mengucapkan terimakasih tidak hanya pada saat skripsi tetapi ilmu dan nasihat bapak selama di kelas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga berkah dan kebaikan selalu menyertai bapak.
5. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang penulis kagumi. Nasihat dan ilmunya telah membuat penulis menjadi individu yang berani untuk bermimpi besar dan percaya pada diri sendiri

terima kasih penulis ucapkan kepada mas garra, semoga hal yang pernah mas garra berikan kembali menjadi berkah yang terus mengalir.

6. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional yang semuanya penulis hormati dan kagumi, mba nisa, mba tiwi, mba ayu, mba gigi, mba gita djausal, mba tety, mas tyo, mas indra, bang hasbi dan bang roby terima kasih atas segala ilmu, nasihat, dan bimbingannya yang telah penulis terima dengan rendah hati, menjadikan penulis individu yang lebih baik dan berilmu, yang inshallah akan penulis gunakan untuk kebaikan.
7. Terima kasih kepada duniaku mama dan papa yang telah memberikan segalanya, yang tidak dapat penulis balas dengan apapun yang ada di dunia, terima kasih atas doa yang terus mengalir tanpa henti, terima kasih untuk segala dukungan dan kasih sayang sepanjang masa yang mama dan papa berikan kepada penulis. Penulis berharap telah membuat papa dan mama bangga akan pencapaian kecil ini.
8. Terima kasih kepada adikku Fernanda M. Adhia, terima kasih telah hadir di hidupku kamu adalah sosok yang membuat penulis kuat dan pantang menyerah.
9. Terima kasih kepada Gib Girls sahabat penulis sedari kecil alsa,finna,tata kalian selalu menjadi tempat pulang dan tempat paling dalam bagi penulis, kalian sosok yang selalu menginspirasi penulis terimakasih untuk segala dukungan selama ini.
10. Terima kasih kepada Soxsista syahla, fasya, vina dan rifa yang tidak hanya menjadi sahabat melainkan sosok saudara dari penulis, terimakasih untuk selalu ada dalam segala waktu sedih dan bahagia penulis terutama pada saat mengerjakan skripsi ini, tetaplah bersama kalian adalah alasan terbesar hidup penulis penuh warna dan disayangi. *I love each and every one of you guys, you're indeed my sanctuary.*
11. Terima kasih kepada seluruh sahabat qqq tiwi,ressy,nabila yang jarang ketemu tetapi dukungannya selalu ada sedari penulis duduk di bangku SMA sampai dengan perguruan tinggi, kalian selalu membuat penulis merasakan tulusnya persahabatan yang tak kenal waktu.

12. Terima kasih kepada dorry Indah, Nanda, Vivi, Igis, Yunita kalian telah berperan besar dalam perkuliahan penulis, tidak hanya sekedar teman kuliah kalian adalah sahabat penulis, terimakasih telah membuat hari-hari perkuliahanku menjadi indah dan seru, penulis akan kangen waktu ambis dan malas-malasan selama perkuliahan bersama dorry. Penulis tidak dapat membayangkan melewati segala rintangan kuliah kalau tidak bersama mereka, *I couldn't ask for a better friendship than this.*
13. Terima Kasih untuk teman-teman Gang Jambu, terutama Ica, Anggun, Dyang, Giany, Pitry, Lala dan Namira *my life would be dull without you guys*, terima kasih untuk tawa, kasih sayang dan kehangatannya, terima kasih selalu menjadi teman kopi sejati penulis.
14. Terima kasih untuk Widya Paramitha selaku my 911, telah menjadi sosok pengertian untuk penulis dan hadir disamping penulis dikala waktu terasa berat dan penuh air mata hingga hari penuh kebahagiaan.
15. Terima kasih untuk Angel, kak Ayu dan bang Yoga, yang telah menjadi rekan magang penulis sewaktu magang di KBRI, terima kasih telah saling menjaga dan selalu ada, pengalaman magang bersama kalian di Laos menjadi kisah indah yang akan penulis ingat.
16. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh Staff KBRI Vientiane Laos 2020 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, telah memberikan kesempatan dan ilmu selama penulis melakukan magang.
17. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan keluarga Hubungan Internasional yang tidak dapat penulis sebut satu-satu namanya, *it was such an amazing experience in life to know each and every one of you see you on top troops!!*

Bandar Lampung, 14 Maret 2022  
Penulis,

**Ninda Mirantama**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>IV</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>V</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Kegunaan Penelitian.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Feminisme Liberal .....	14
2.1.2 Jejaring Kelembagaan .....	16
2.1.3 Maskulinitas Militer.....	17
2.2 Kerangka Pemikiran.....	18
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
3.1 Metode Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian .....	20
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
4.1 Maskulinitas Militer dalam Peningkatan kasus SEA di Republik Demokratik Kongo.....	24
4.2 Peran <i>Women Peacekeepers</i> dan Kerjasama Kelembagaan dalam Penanganan SEA di Republik Demokratik Kongo .....	30
4.3 Penerapan Liberal Feminisme pada <i>Women Peacekeepers</i> .....	56
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	63
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1.1 <i>Status by Mission</i> .....	3
1.1.2 <i>Category Personnel (Allegation)</i> .....	4
1.1.3 <i>Age of Victim (by Allegation)</i> .....	4
4.1.1 Identifikasi jumlah korban .....	25
4.1.2 Jenis Tuntutan SEA di Republik Demokratik Kongo 2017-2018.....	26
4.2.1 Status per tahun... ..	40

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Tabel Komporasi Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Gambar Kerangka Pemikiran .....	19
4.1.1 Rangkuman Kalkulasi demografis kekerasan seksual berdasarkan usia dan wilayah di provinsi Republik Demokratik Kongo .....	27
4.1.2 Progres Agensi dalam penanganan SEA.....	52

## DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Amnesty International</i>
DK	: Dewan Keamanan
FARDC	: <i>Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo</i>
MONUSCO	: <i>The United Nations Organization Stabilization in the Democratic of Congo</i>
MINUSRO	: <i>The United Nations Mission for the Referendum in Westrn Sahara</i>
MINUSCA	: <i>The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic</i>
MINUSMA	: <i>The United Nations Multidimensional Integreted Stabilization Mission in Mali</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SEA	: <i>Sexual Exploitation Abuse</i>
SDG	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SGBV	: <i>Sexual and gender based violence</i>
UNSMID	: <i>United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur</i>
UNISFA	: <i>United Nations Interim Security Force for Abyei</i>
UNMISS	: <i>United Nations Mission in South Sudan</i>
UNSC	: <i>United Nations Security Council</i>
UNSCR	: <i>United Nations Security Council Resolution</i>

## I. PENDAHULUAN

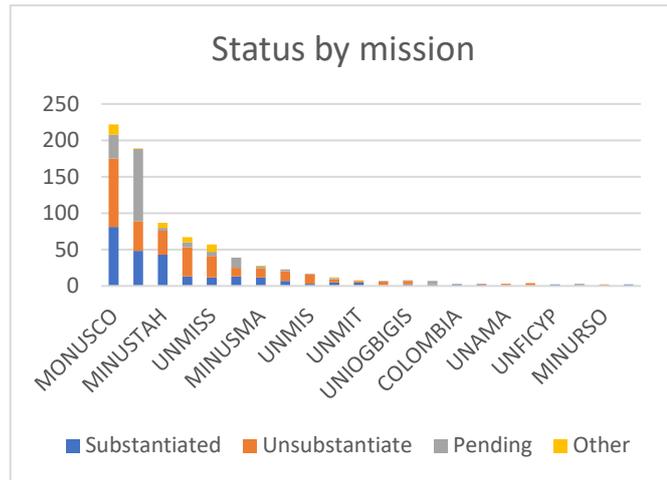
### 1.1 Latar Belakang dan Masalah

Gagasan *peacekeeping* muncul sebagai salah satu rangkaian agenda PBB dan aktor internasional lainnya dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional yang muncul sebagai respons dari permusuhan perang dingin antarnegara adidaya. Dalam memenuhi tanggung jawab ini, PBB sebagai pemberi mandat memiliki peranan yang krusial dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan agenda tersebut. Salah satu agenda yang diadopsi adalah *peacekeeping operation* atau penjaga perdamaian yang seiring berjalannya waktu telah berevolusi sesuai periodenya, yaitu akhir perang dunia kedua, awal pembentukan PBB sampai dengan pertengahan tahun 1980-an, akhir perang dingin, dan pascaperang dingin (Sorenson, 2005). Evolusi tersebut membawa perubahan pada konseptualisasi *peacekeeping* dari keamanan tradisional menjadi nontradisional, sehingga individu telah menjadi fokus utama atau lebih tepat disebut sebagai pendekatan keamanan manusia (Sorenson, 2005).

Ketidakstabilan secara politik yang muncul pada suatu negara dapat menyebarkan ketidakstabilan di luar perbatasan, membuat PBB, negara-negara besar, dan *non-governmental organization* (NGO) fokus pada apa yang menyebabkan ketidakamanan individu yang akan mendorong pada fenomena kehancuran negara. Pergeseran fokus ke faktor-faktor penyebab ketidakamanan manusia seperti kekerasan dan ketidakstabilan politik, perang, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, dan penyakit telah mendorong peningkatan operasi penjaga perdamaian PBB. Dengan sekitar (Jett D. C., 2019) perdamaian yang terlibat dalam tiga belas operasi (Jett D. C., 2019), PBB menghabiskan hampir

tujuh miliar dolar setiap tahun dalam upaya untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.

Operasi perdamaian merupakan salah satu alat yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam mencegah negara untuk kembali (Peacekeeping, 2021) Seiring dengan berkembangnya dinamika internasional, cakupan konflik berkembang menjadi lebih luas yang melibatkan beberapa aktor, hal tersebut mengantarkan pada perubahan dalam mandat *peacekeeping* yang lebih fokus pada populasi rentan sehingga adanya peningkatan kontak dengan warga (Nicole, 2015). Dalam hal tersebut upaya-upaya dibagi menjadi beberapa upaya dalam menangani konflik di Republik Demokratik Kongo sesuai dalam Pasal 1 Piagam PBB yang dimulai dari *preventive diplomacy*, *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding* (Jett D. C., 2019). Dari keempat fase tersebut kasus SEA semakin meningkat pada fase *peacebuilding*, intensitas tersebut mendukung penciptaan tindakan tercela, seperti munculnya tuduhan merujuk pada *male peacekeepers* yang dinyatakan bersalah atas kekerasan dan berbagai bentuk *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA) atau eksploitasi dan pelecehan seksual termasuk perdagangan seks, prostitusi, memaksa anak-anak menjadi pelacur, dan berhubungan seks dengan anak di bawah umur (Burké R. , 2014), yang melibatkan penduduk lokal khususnya di negara-negara dengan operasi perdamaian. Kasus pelanggaran ini muncul secara bertahap dan terus mengalami peningkatan seperti yang diungkapkan oleh media dan berbagai NGO hak asasi manusia.



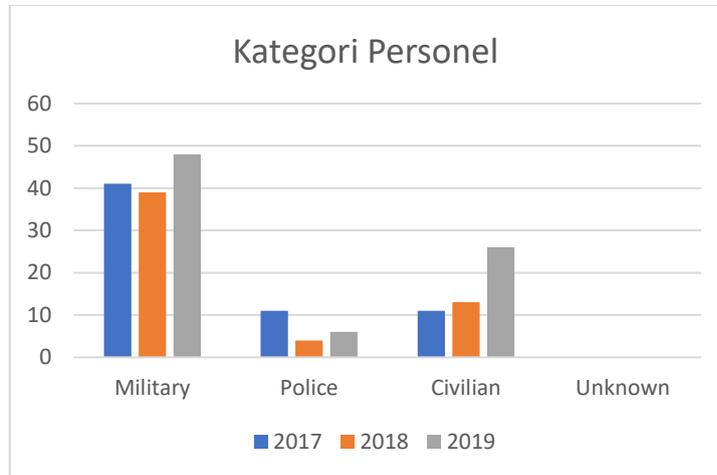
Gambar 1.1.1 Status penanganan SEA berdasarkan misi, tahun 2017-2019

Sumber: UN Conduct Mission

Data di atas adalah laporan dari divisi kedisiplinan PBB yang menjelaskan jumlah peningkatan kasus SEA dari tahun 2017-2019. Paparan data memperlihatkan adanya peningkatan terhadap jumlah kasus diiringi dengan besarnya kapasitas dari misi operasi perdamaian, dan menjadikan *The United Nations Organization Stabilization in the Democratic of Congo* (MONUSCO) sebagai operasi perdamaian terbesar dengan anggaran berjumlah 43% dari tujuh miliar dolar AS (Rodriguez, 2015). MONUSCO memiliki mandat yang kompleks sehingga hal tersebut memaparkan dampak negatif bagi warga sipil pada saat menerima bantuan kemanusiaan.

Selama konflik bersenjata di bagian timur Republik Demokratik Kongo terjadi, puluhan ribu wanita dan anak perempuan telah menjadi korban pemerkosaan sistematis dan serangan seksual yang dilakukan oleh *UN male peacekeepers*. Wanita dan anak perempuan ditawarkan uang atau makanan (News, 2021) dalam jumlah kecil sebagai imbalan. Hal tersebut telah menciptakan kerentanan terhadap situasi ini, sering kali dimanfaatkan oleh *male peacekeepers* terlepas dari status tugas dan mandat yang diberikan, yaitu melindungi warga sipil. Data tersebut menunjukkan sebanyak 81 kasus telah terbukti melalui investigasi oleh PBB dari tahun 2010 hingga 2020 (Mission, 2021) terjadi di MONUSCO dan menjadikan

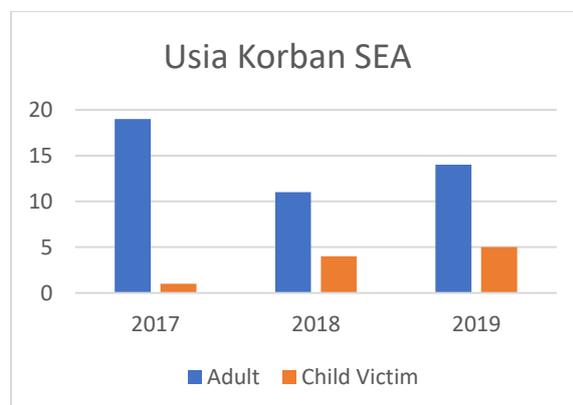
investigasi tersebut sebagai kasus SEA tertinggi dari semua misi operasi perdamaian.



Gambar 1.1.2 Kategori Personel (Berdasarkan Tunduhan) tahun 2017-2019

Sumber : UN Conduct Misson

Berdasarkan hasil laporan *UN Conduct Mission*, pelaku *Sexual Exploitation and Abuse* melibatkan berbagai pihak dan jenis anggota yaitu anggota militer, polisi, anggota staf internasional, relawan, konsultan, penduduk local, hingga kontraktor (Burkè, 2014) selama operasi perdamaian berjalan. Kategori tersebut memiliki status hukum yang berbeda, (Heartcote, 2014) sehingga menimbulkan pertimbangan hukum dan praktis yang terpisah.



Gambar 1.1.3 Usia Korban (Secara tuntutan )

Sumber : UN Conduct Mission

Berdasarkan data yang ada pada gambar 1.1.3 tentang Usia Korban SEA, sampai sekarang kasus kekerasan seksual oleh *peacekeepers* di MONUSCO masih terus berlanjut sebanyak dua ribu pengaduan pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap *UN peacekeepers* telah dilaporkan. Menurut *American journal of Public Health*, sekitar 48 wanita setiap jam diperkosa di Republik Demokratik Kongo (Guardian, 2021). Korban biasanya adalah perempuan muda yang hidup di bawah garis kemiskinan, berusia tiga belas hingga delapan belas tahun (Kovatch, 2016), meskipun ambang batas tersebut dapat mencakup anak-anak dan wanita. Untuk waktu yang lama, tidak ada sistem kodifikasi bagi korban untuk melaporkan dugaan SEA secara umum, khususnya dugaan terhadap *UN peacekeepers*.

Penelitian ini mengambil data dari tahun 2017. Data tersebut mengindikasikan penurunan jumlah dugaan yang tercatat pada tahun 2017 dibandingkan dengan seratus empat tuduhan (Wiker, 2016) yang dilaporkan pada tahun 2016. Laporan di mulai bahwa dua belas dari tuduhan yang dilaporkan di 2017, 53% (Wiker, 2016) terkait dengan peristiwa di tahun 2017, pada tahun 2018, sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2018, PBB menerima total 148 tuduhan SEA yang melibatkan langsung pekerja PBB, dan seratus sebelas melibatkan staf dari organisasi mitra pelaksana program PBB. Data tersebut mewakili peningkatan jumlah insiden yang dilaporkan dibandingkan dengan 2017 ketika 138 tuduhan dibuat, dan 2016 ketika 165 tuduhan dibuat (Wiker, 2016)

Pada tahun 2019, delapan puluh tuduhan dilaporkan terdapat satu tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh setidaknya satu orang yang dapat diidentifikasi pelaku atau terhadap satu korban yang dapat diidentifikasi, yang melibatkan personel penjaga perdamaian dan misi politik khusus. Angka ini meningkat dibandingkan dengan 56 tuduhan dilaporkan pada 2018 23 dan 63 dilaporkan pada 2017 (Wiker, 2016) SEA terjadi didukung dengan banyak faktor, seperti kesenjangan geografis, sosial, khususnya ketidaksetaraan gender termasuk kecenderungan peran laki-laki atau *male dominated* sebagai pembuat kebijakan di politik internasional yang menyampingkan kesetaraan gender dalam pembuatannya, sehingga wanita dalam wilayah konflik cenderung menjadi korban dan penerima bantuan (Wiker, 2016) SEA yang dilakukan oleh penjaga perdamaian

PBB menjadi masalah besar bagi negara pengirim maupun negara penerima dengan berbagai alasan.

Pertama, hal tersebut merusak kredibilitas dan efektivitas misi penjaga perdamaian dan menciptakan ketidakpercayaan di antara masyarakat lokal dan personel penjaga perdamaian yang sangat merugikan pembangunan negara untuk menciptakan perdamaian, khususnya terhadap pengurangan isu kekerasan terhadap wanita. Kedua, SEA berkontribusi terhadap penyebaran penyakit menular seksual di wilayah tersebut, dan peningkatan prostitusi secara signifikan selama dan setelah misi operasi perdamaian (Wiker, 2016) menciptakan masalah baru di daerah tersebut, misalnya *peacekeepers babies* sebagai bayi yang lahir dari hubungan seksual dengan gadis dan wanita setempat (Hutabarat, 2017) menjadi salah satu indikator terciptanya rantai kemiskinan karena tidak ada dukungan yang layak dalam sandang pangan dan papan atau tanggung jawab dari pelaku.

Fenomena SEA menjadi dorongan terhadap perubahan peran wanita di wilayah konflik, yaitu menjadi aktor yang memiliki pengaruh sebagai pencegah dan pencipta perdamaian (Hutabarat, 2017). Peningkatan kasus SEA secara langsung menciptakan reformasi pada kebijakan PBB menjadi ramah gender, yang mempengaruhi arah mandat secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya berdampak tidak hanya pada keamanan suatu negara melainkan keamanan individu, khususnya wanita (Kovatch). *Zero tolerance* adalah salah satu mandat yang dilahirkan PBB dalam menanggapi isu *sexual abuse exploitation* (SEA). Pendekatan yang dilakukan bersifat multidimensional, meliputi pemahaman budaya lokal, agama, adat istiadat, dan cara hidup atau *humanitarian approach* (Doctrine, 2008).

Kebijakan *zero tolerance* menjadi landasan yang tepat untuk penanganan kasus SEA. Dilandasi dengan pendekatan yang ramah gender PBB mampu menciptakan keadilan untuk para korban karena kebijakan tersebut membantu peningkatan kesadaran terhadap kasus SEA secara luas, menciptakan konsistensi penanganan kasus dan efektifitas dari sikap disiplin termasuk investigasi kasus SEA. *Zero tolerance* juga menjadi penekanan terhadap peran wanita dalam operasi perdamaian. Pascakelahiran kebijakan *zero tolerance*, terlihat adanya peningkatan peran wanita pada semua area operasi perdamaian dalam kondisi yang sama, seperti laki-laki, dalam hal ini wanita menjadi *women peacekeepers*. Menurut data statistik

PBB pada tahun 1993, hanya 1% wanita yang berpartisipasi sebagai personel berseragam. Pada tahun 2020, adanya peningkatan terhadap partisipasi *women peacekeepers* sekitar 95000 penjaga perdamaian, perempuan merupakan 4,8% kontingen militer, 10,9% dari unit polisi yang dibentuk, dan 34% dari personel keadilan dan koreksi yang disediakan pemerintah dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB (PBB, 2021).

Peningkatan *women peacekeepers* juga merupakan cetusan dari resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang merupakan resolusi pertama yang membahas dampak konflik bersenjata terhadap wanita. Resolusi tersebut menekankan pentingnya partisipasi wanita yang setara dan penuh<sup>37</sup> sebagai agen aktif dalam pencegahan dan resolusi konflik, pembangunan perdamaian, dan pemeliharaan perdamaian. Resolusi tersebut memerintahkan negara anggota untuk memastikan partisipasi yang setara bagi wanita dan keterlibatan penuh dalam semua upaya untuk memelihara dan mempromosikan perdamaian dan keamanan, dan mendesak semua aktor untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan mengintegrasikan perspektif gender di semua bidang *peacebuilding* (PBB, 2021)

Memahami dampak SEA dalam operasi perdamaian dan keamanan, DK-PBB juga mengadopsi resolusi 1820 (PBB, 2021) resolusi DK-PBB 1820 memperkuat resolusi 1325 dengan pernyataan bahwa kekerasan seksual dalam konflik adalah kejahatan perang dan meminta agar kelompok yang menghadapi konflik bersenjata segera mengambil langkah yang tepat untuk melindungi penduduk sipil dari kekerasan seksual, termasuk melatih pasukan dan menegakkan upaya disiplin.

Sampai saat ini, 6,6 % (United Nations Peacekeeping, 2021) pasukan dari semua bagian pasukan perdamaian PBB adalah wanita dan sebanyak 706 (United Nations Peacekeeping, 2021) wanita ditempatkan di MONUSCO. Peningkatan *woman peacekeepers* dalam operasi perdamaian telah membantu menghantarkan kita pada realitas peranan wanita dalam wilayah konflik, yaitu:

- (1) Wanita dapat memberikan sisi ketenangan pada laki-laki dan mengurangi tindak kekerasan oleh penjaga perdamaian.
- (2) Wanita lebih cenderung berinteraksi dengan penduduk lokal.

(3) Wanita adalah responden yang lebih baik untuk korban kekerasan seksual

(4) Wanita adalah inspirasi bagi wanita lokal. (Alchin, 2015)

Meskipun upaya tersebut seharusnya dilakukan lebih awal, penting untuk mengakui bahwa PBB telah berusaha untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh *peacekeepers*. DK-PBB telah mengadopsi berbagai resolusi yang diarahkan untuk meningkatkan status wanita.

Pandangan feminis liberal menjadi acuan utama penulis dalam menganalisis perubahan kebijakan PBB dan peningkatan peran wanita di operasi perdamaian. Penekanan terhadap “kebebasan” dan “kesamaan” (Bale, 2016) yang harus dimiliki setiap individu menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kasus SEA. Kebebasan untuk menyatakan bahwa isu kekerasan seksual itu nyata dan menjadi ancaman bagi wanita pada periode konflik dan pascakonflik dengan kecepatan yang sebanding bahkan lebih besar daripada selama konflik, khususnya pada operasi perdamaian terbesar, yaitu MONUSCO cenderung diabaikan dengan stigma sebagai sebuah isu yang lunak mencerminkan perlakuan yang tidak setara terhadap wanita, melanggar komitmen terhadap kebebasan, hak-hak yang tidak dapat dicabut, dan pengembangan mandiri semua warga negara yang harus terpapar dalam sebuah kebijakan. Penulis melihat bahwa keterlibatan wanita secara besar adalah upaya untuk menyelesaikan isu SEA yang berkaitan dengan wanita sehingga keterlibatan *women peacekeepers* dalam hal ini menjadi kunci prioritas mempromosikan hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil dan mendorong perempuan untuk menjadi bagian yang berarti dari proses perdamaian dan politik.

Sebagai upaya menyelesaikan dan mencegah SEA, kolaborasi antara aktor negara dan nonnegara memiliki peran krusial yang dapat dicapai dengan membangun jaringan kerja sama sebagai langkah utama. PBB sebagai organisasi internasional masih memiliki keterbatasan karena karakter multilateralismenya, ditandai dengan tidak adanya badan hukum PBB menciptakan keterbatasan pemberian hukuman terhadap *male peacekeepers* pelaku kekerasan SEA. Jejaring kerja sama dikhususkan untuk memperkuat mekanisme, mencegah, dan menanggapi SEA. Sejauh ini, di PBB telah bekerja sama dengan lebih dari 1100

mitra (Goodin, 2008) dalam menangani isu SEA. Komisaris Tinggi UNHCR mengambil peran sebagai *Inter-Agency Standing Committee* (IASC) berkaitan dengan perlindungan dari SEA pada September 2019 dan telah meluncurkan sejumlah inisiatif di bawah mandatnya (UN Refugee Agency, 2021) Seluruh upaya jejaring beserta mandat yang dipaparkan menjadi bagian dari upaya *women peacekeepers* dalam menangani isu SEA yang akan dijelaskan oleh penulis menggunakan kacamata jejaring kelembagaan, menekankan bahwa pencapaian sebuah perdamaian dan pemerintahan yang baik akan dapat tercapai apabila melibatkan seluruh aktor (Goodin, 2008). Teori Jejaring Kelembagaan mengakui kerja sama sebagai bentuk perwakilan ide dan nilai dalam politik internasional. Kerja sama jejaring efektif dalam memberikan kontribusi unik dan substantif untuk meningkatkan peran *women peacekeepers* dalam operasi pemeliharaan perdamaian.

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi penulis untuk memperkaya teori dalam melengkapi penelitian, menemukan inspirasi baru serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang berjudul “Peran *Women Peacekeepers* dalam Penyelesaian SEA di Republik Demokratik Kongo”. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu, kemudian membuat ringkasannya, dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

Penelitian *pertama* adalah jurnal oleh (Paramasatya, 2015). yang menjelaskan mengenai peran *women peacekeepers* dalam bina damai di MONUSCO. Operasi perdamaian yang berlangsung di Republik Demokratik Kongo telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan wanita Kongo khususnya pada sisi ekonomi. Berdasarkan data dari penelitian Paramastya sebanyak 61,2 % wanita (Paramasatya, 2015) di Republik Demokratik Kongo berada di bawah garis kemiskinan dan salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kesenjangan gender yang sudah melekat pada budaya setempat

kemudian melebar seiring hadirnya operasi perdamaian. Isu SEA oleh *male peacekeepers* menjadi representasi keterbatasan wanita di Kongo untuk berperan aktif secara ekonomi peran yang diisi oleh wanita dalam memenuhi kebutuhan ekonomi bersifat rendah dan menjadikan wanita sebagai korban sehingga dibutuhkan penekanan keseimbangan gender dalam operasi perdamaian, peningkatan jumlah *women peacekeepers* menjadi dorongan secara internal bagi wanita yang menjadi korban dari kasus tersebut.

Penelitian *kedua* adalah jurnal oleh (Alchin, 2015). Jurnal ini memberikan pandangan luas dan detail wanita dalam operasi perdamaian menggunakan kacamata feminisme (feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme *post modern*, dan feminisme post kolonial), gender sekaligus pendekatan *human security* (Alchin, 2015). Varian yang dipaparkan menjelaskan terciptanya kontribusi positif dan efektifitas dari peningkatan wanita dalam operasi perdamaian dan upaya dalam mencegah peningkatan SGBV (*sexual and gender based violence*) di *host state* dan kebijakan tersebut diadopsi oleh PBB yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan memiliki tujuan untuk kesetaraan gender dan perdamaian abadi.

Penelitian *ketiga* adalah jurnal yang ditulis oleh (Hendrick, 2017). Jurnal ini menjelaskan mengenai implementasi agenda *women, peace, security* Uni Afrika. Jurnal ini menyatakan bahwa pengembangan kerangka kerja, kebijakan, dan strategi menghasilkan keberhasilan untuk menciptakan partisipasi inklusif wanita dalam institusi, keamanan, dan proses perdamaian tanpa refleksi yang lebih dalam tatanan patriarki dan militerisasi pasca-konflik (Hendrick, 2017).

Penelitian *keempat* ditulis oleh (Taufik, 2017) ini menjelaskan mengenai jaringan aktor dalam perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik berbasis jaringan merupakan cara pandang baru sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis (Taufik, 2017). Dalam pendekatan jaringan pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam merumuskan kebijakan publik, pemerintah harus mampu membangun jaringan antaraktor di luar pemerintahan, seperti kalangan profesional, NGO, media, masyarakat, dan beberapa pihak yang memiliki tujuan yang sama dalam suatu isu sehingga kekurangan sumber daya

dapat diatasi dengan membangun jaringan antar aktor dalam proses pembuatan kebijakan (Taufik, 2017).

Penelitian yang *kelima* ditulis oleh (Kronsell, 2011). Jurnal ini menjelaskan mengenai hubungan gender dalam studi militer dan organisasi pertahanan. Dijelaskan bahwa dalam institusi tersebut hegemoni maskulinitas cenderung merepresentasikan dan merefleksikan sebuah norma dan metodologi feminis dapat diterapkan dalam institusi dan organisasi pertahanan dalam menganalisis kritis suatu institusi secara normal (tanpa menggunakan maskulinitas sebagai norma) dengan mendengarkan penolakan wanita terhadap norma-norma hegemoni maskulinitas dengan keterlibatan perannya dalam institusi sehari-hari. Jurnal ini menggunakan metodologi feminis dengan mengembangkan sudut pandang prespektif. Pemaparan dari jurnal ini membantu penulis menjelaskan *hegemonic masculinity* yang menjadi salah satu landasan konseptual dari teori yang disajikan.

**Tabel 1. 1 Tabel Komparasi Penelitian Terdahulu**

<b>Indikator</b>	<b>Satwika Paramasatya</b>	<b>Angela Nicole Achlin</b>	<b>Cheryl Hendric</b>	<b>Taufik</b>	<b>Annica Korsnell</b>
<b>Judul Penelitian</b>	Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian MONUSCO.	<i>Are Women Making a Difference a in Peacekeeping Operations? Considering the Voices of South African Women Peacekeepers.</i>	<i>Progress and Challenges in Implementing the Women, Peace and Security Agenda in the African Union's Peace and Security Architecture</i>	<i>Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik</i>	<i>Gendered Practices in institution of Hegemonic masculinity- reflection from feminist standpoint theory</i>
<b>Pendekatan Penelitian</b>	<b>Kualitatif</b>	<b>Kualitatif</b>	<b>Kuantitatif</b>	<b>Kualitatif</b>	<b>Kualitatif</b>
<b>Konsep dan Teori</b>	<i>Peace building.</i>	<i>Human Security</i>  Feminisme Radikal	Kesetaraan Gender	<i>New Institutionalism</i>  <i>Network Institutionalism</i>	<i>Hegemonic Masculinity</i>  Feminis Liberal

<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>Tantangan dan hambatan yang dihadapi menghalangi bina damai atau <i>peace building</i>. Tantangan dan hambatan tersebut hanya bisa diatasi jika keterlibatan wanita dalam operasi perdamaian semakin ditingkatkan.</p>	<p>Pendekatan feminisme membantu mengidentifikasi kesenjangan pada pendekatan “<i>Human Security</i>” adanya kelemahan dalam menganalisis menggunakan kacamata gender dalam isu keamanan individu.</p>	<p>Pengembangan kerangka kerja, kebijakan, dan strategi memiliki peran krusial dalam menciptakan keberhasilan untuk menciptakan partisipasi inklusif wanita dalam institusi, keamanan, dan proses perdamaian tanpa refleksi yang lebih dalam tatanan patriarki dan militerisasi pasca-konflik.</p>	<p>Institusionalisme adalah peran yang dimainkan oleh tujuan bersama dalam sistem internasional dan kemampuan organisasi internasional untuk membuat negara bekerja sama. Dalam pendekatan jaringan pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam merumuskan kebijakan publik, pemerintah harus mampu membangun jaringan antar aktor di luar pemerintahan seperti kalangan profesional, NGO, media, masyarakat dan beberapa pihak yang memiliki tujuan yang sama.</p>	<p>Lembaga dan institusi militer dapat menggunakan metodologi dan sudut pandang feminis dalam menjalankan lembaganya dan melibatkan wanita dalam praktik sehari-hari dengan mengurangi norma <i>Hegemonic Masculinity</i></p>
--------------------------	---	--	--	---	---

Sumber: Hasil olah Data Peneliti

Dapat disimpulkan dari lima artikel jurnal yang di-review oleh penulis bahwa operasi perdamaian PBB menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus SEA di Republik Demokratik Kongo hal tersebut terjadi akibat adanya kelemahan pada pendekatan gender dalam pembuatan kebijakan, sehingga reformasi kebijakan yang ramah gender menjadi langkah utama dalam menyelesaikan isu SEA. Langkah awal dari perubahan tersebut adalah peningkatan jumlah *women peacekeepers* dalam operasi perdamaian. *Women peacekeepers* memiliki peran krusial untuk mencegah dan mengurangi isu SEA yang didukung melalui kerjasama jaringan dengan berbagai aktor.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Maraknya kasus SEA di Republik Demokratik Kongo mendorong PBB untuk melakukan perubahan terhadap pendekatan dalam pembuatan kebijakannya, salah satunya adalah melibatkan wanita sebagai *women peacekeepers* dalam operasi perdamaian. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana peran *women peacekeepers* dalam penyelesaian SEA di Republik Demokratik Kongo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan peran *women peacekeepers* dalam penyelesaian isu SEA di Republik Demokratik Kongo.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan secara akademis:**

Secara akademis penelitian ini memberikan analisis mengenai peran *woman peacekeepers* dalam penanganan SEA di Republik Demokratik Kongo 2017-2019 dengan melihat menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai alat analisis, yaitu feminisme liberal, maskulinitas militer, dan jejaring kelembagaan terhadap pembuatan sekaligus penekanan pada kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan peran wanita dalam penanganan di ranah konflik sehingga wanita tidak menjadi korban melainkan menjadi agen aktif yang dapat mengurangi isu-isu seperti SEA.

#### **1.5.2 Kegunaan secara praktis:**

Penelitian ini diharapkan untuk memberi wawasan dan gambaran baru terhadap penulis dan pembaca terkait peranan wanita sebagai agen aktif dalam ranah konflik dan perang khususnya dalam organisasi internasional, yaitu PBB.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah dasar terpenting dalam penelitian karena berisi seperangkat konsep, definisi, dan proporsi untuk menyelesaikan penelitian. Untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA) di Republik Demokratik Kongo, penulis menggunakan tiga teori, yaitu teori feminisme liberal, teori jejaring kelembagaan, dan maskulinitas militer. Teori feminis liberal membantu penulis untuk mendeskripsikan peran *women peacekeepers* dalam isu SEA, sedangkan teori jejaring kelembagaan membantu penulis menjelaskan kerjasama bersama beberapa aktor yang dilakukan oleh *women peacekeepers* sebagai upaya menyelesaikan SEA dan teori maskulinitas militer untuk menjelaskan fenomena SEA yang dilakukan oleh *male peacekeepers* yang terjadi akibat adanya kesenjangan kekuatan antara laki-laki dan wanita.

#### 2.1.1 Feminis Liberal

Gerakan feminisme lahir dan muncul melalui tiga gelombang diawali dengan adanya suatu eksploitasi terhadap wanita, fokus pertama dimulai dari adanya tuntutan terhadap kesetaraan gender khususnya pada kesempatan ekonomi dan hak-hak politik yang setara dengan laki-laki karena pada hakikatnya wanita dan laki-laki memiliki kapasitas yang sama (Bale, 2016), aliran feminis yang terbentuk pada gelombang ini adalah feminis liberal, radikal, dan feminis marxis atau sosialis yang diikuti pada gelombang kedua yaitu perjuangan terhadap partisipasi wanita di seluruh aspek kehidupan sosial sekaligus hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki terlepas dari perbedaan ras dan kelas (Bale, 2016), selain itu pada

gelombang ini menekankan pada perbedaan fisik wanita dan laki-laki maupun psikologis sehingga menciptakan penindasan. Pada gelombang ketiga muncul karena adanya ketidakpuasan dari perjuangan hak-hak wanita di gelombang kedua yang melahirkan sebuah interpretasi pos struktur dari gender dan seksualitas (Bale, 2016) yang menjadi fokus utama dalam gelombang ketiga.

Penelitian ini berfokus pada feminis liberal untuk menjelaskan peran *women peacekeepers* sebagai agen untuk menyoroti besarnya ketidaksetaraan gender di negara-negara misi serta adanya mentalitas superioritas laki-laki dalam hal ini militer *masculinity* yang berkontribusi terhadap tingginya kasus SEA di Republik Demokratik Kongo. Menurut feminisme liberal, patriarki adalah sumber opresi terhadap perempuan dan masyarakat patriarki cenderung mencampuradukkan arti antara seks dan gender (Baehr, 2013) ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada seksnya, terjadi karena konstruksi sosial, bukan berdasarkan pada “sifat dasar bawaan” atau sesuatu yang *given*.

Teori liberal feminis berfokus pada kemampuan seorang wanita untuk menunjukkan kesetaraan dan hak-haknya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya (Blackwell, 2016) melalui reformasi politik dan hukum dalam kerangka demokrasi liberal yang sangat sulit dicapai karena kapasitas seorang wanita di anggap tidak sepadan dengan laki-laki. *Women peacekeepers* adalah salah satu inisiasi dari PBB dalam merespon isu kesenjangan gender yang lahir dari kebijakan *zero tolerance* melalui konsep feminis liberal. Kehidupan yang baik adalah asumsi dasar dari liberalisme, warga negara adalah insan yang bebas dan bermartabat dan juga sebagai pembuat keputusan sehingga menstabilkan sistem dan pemerintah dapat menciptakan perubahan dari struktur yang menindas (Blackwell, 2016).

Teori feminis liberal membantu menguraikan sejauh mana wanita kurang terwakili dalam kegiatan dari berbagai bidang dan untuk menunjukkan upaya agar dapat mengatasi hambatan untuk partisipasi wanita (Whitworth, 2016) dan mengungkap bahwa peran wanita sangat krusial dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan (Whitworth, 2016).

### 2.1.2 Teori Jejaring Kelembagaan

SEA merupakan fenomena yang sangat kompleks sehingga pada upaya penanganan dan pengurangannya membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Institusionalisme menekankan pada peran yang dimainkan oleh tujuan bersama dalam sistem internasional dan kemampuan organisasi internasional untuk membuat negara bekerja sama (Taufik, 2017). Hal ini relevan mengingat PBB sebagai organisasi internasional menjadi representasi *good governance* (Taufik, 2017). Teori jejaring kelembagaan memperhitungkan campuran program dan kebijakan dari berbagai aktor untuk mencapai suatu tujuan.

Salah satu ciri dari teori jejaring kelembagaan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro yang kerja sama yang dilakukan bisa dimulai dari kecil hingga dalam skala besar dalam kasus SEA ini jejaring secara besar memiliki peran sebagai pihak ketiga yang dapat menegakkan aturan dan memberikan sanksi atas ketidakpatuhan (Goodin, 2008). Fokus utama dari teori jejaring kelembagaan dibagi menjadi tiga hal yaitu :

- (1) Hubungan pertama, antar aktor bersifat simetris baik dalam kadar ataupun intensitasnya kedua aktor saling memenuhi dengan sesuatu yang berbeda (Taufik, 2017).
- (2) Ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan yang lebih luas (Taufik, 2017).
- (3) Adanya kelompok jaringan yang menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu (Taufik, 2017).

Ketiga hal tersebut membantu menjelaskan pengaruh kerja sama jejaring dalam peran *women peacekeepers* kerja sama jejaring karena memberikan kemungkinan komunikasi antara aktor yang berbeda secara berkelanjutan dalam penurunan dan peningkatan jumlah SEA oleh *male peacekeepers* sebelum dan sesudah adanya keterlibatan *women peacekeepers* dalam wilayah konflik.

### 2.1.3 Maskulinitas militer

Teori maskulinitas militer menyatakan bahwa peran dan pandangan maskulin ditanamkan pada laki-laki muda di militer mewakili beberapa fitur pria yang paling agresif, diskriminatif, dan kejam yang harus disalahkan atas perilaku kasar selama operasi perdamaian. Selama pelatihan militer, para pemuda dilatih untuk menjadi pejuang dan pembunuh, dengan tujuan utama untuk mengalahkan musuh dalam perang. Sebuah analisis gender “tentara tidak dilahirkan, mereka dibuat; dan bagian dari apa yang membuat prajurit adalah perayaan dan penguatan beberapa elemen maskulinitas yang paling agresif, dan tidak aman (elemen yang mempromosikan kekerasan, kebencian terhadap wanita, homofobia, dan rasisme) (Wiker, 2016)

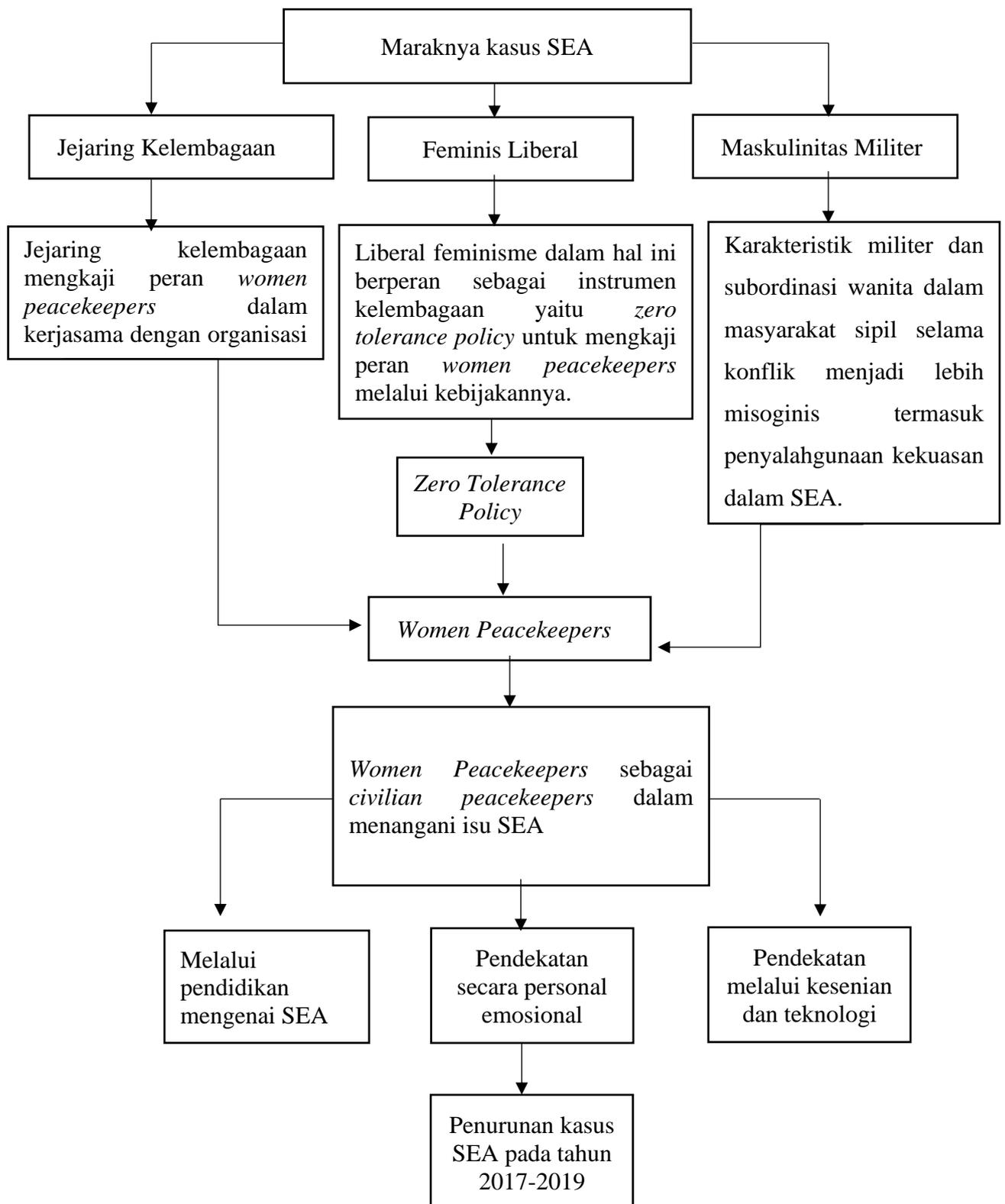
Unsur-unsur *hyper-maskulin* ini dapat dilihat sebagai penegakan perilaku eksploitatif dan kasar, karena perilaku yang meragukan diterima dan bahkan didorong selama beberapa tahun selama pelatihan militer. Dengan demikian, maskulinitas militer menciptakan seorang pejuang dengan karakteristik tertentu yang berguna dalam perang. Pada waktu tertentu, kekerasan terjadi di luar situasi militer yang ekstrim, khususnya selama operasi penjaga perdamaian. Para ahli teori berpendapat bahwa untuk meningkatkan minat laki-laki menjadi tentara, militer mengajarkan kepada anggota baru bahwa mereka berhak berhubungan seks dengan perempuan (Wiker). Ketika sifat-sifat *hyper-masculine* ini ditegakkan dan didorong selama bertahun-tahun, dapat menjadi suatu alasan penjaga perdamaian menganiaya dan menggunakan wanita dan anak-anak digunakan dan dianiaya dengan izin. Dengan demikian, militer dapat dilihat sebagai sesuatu yang menciptakan dan bahkan mendorong perilaku menyimpang ini. *Women peacekeepers* memiliki peran yang krusial dalam mengurangi budaya maskulinitas militer karena kehadiran wanita mencegah mencegah *male peacekeepers* melakukan kejahatan. *Women peacekeepers* fokus pada tanggung jawab untuk melindungi penduduk tuan rumah dari rekan-rekan laki-laki mereka (*male peacekeepers*) dan tanggung jawab untuk meningkatkan kredibilitas PBB untuk meningkatkan citra misi (Kovatch).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Peneliti akan mendeskripsikan peran *women peacekeepers* dalam menyelesaikan masalah *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA) di Republik Demokratik Kongo. Fenomena SEA terjadi akibat melekatnya budaya Maskulinitas militer di operasi perdamaian dalam situasi konflik atau perang, budaya patriarki menjadi lebih intens dan pembagian gender diperbesar. Feminis liberal membantu penulis untuk menjelaskan *zero tolerance policy* yang dilahirkan oleh PBB selaku organisasi internasional sebagai upaya dalam menangani isu *Sexual Exploitation Abuse* yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Kebijakan ini adalah pendekatan kesadaran gender dan memfokuskan pada peran wanita dalam ranah konflik dan perang, yaitu salah satunya dengan mengerahkan *women peacekeepers* yang memiliki fokus utama dalam kasus ini, yaitu untuk mencegah dan mengurangi konflik. Feminis liberal menjadi acuan penulis untuk mengkaji peran *women peacekeepers* melalui kebijakan-kebijakannya. Feminis liberal juga menjadi acuan penulis dalam menilai keberhasilan dari *zero tolerance policy* karena dari data yang diperoleh penulis, ada perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun terhadap wanita yang menjadi korban SEA di Republik Demokratik Kongo dari sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diberlakukan.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan kacamata jejaring kelembagaan sebagai upaya untuk mengkaji peran *women peacekeepers* untuk menyelesaikan *sexual exploitation and abuse* di Republik Demokratik Kongo. Dalam kerja sama dengan organisasi internasional, pemerintahan Republik Demokratik Kongo dan NGO, mempertimbangkan PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga sebagai upaya pencapaian *good governance*, organisasi internasional perlu melakukan kerja sama pada negara dan NGO. Jejaring kelembagaan juga membantu penulis untuk menjabarkan hal tersebut.

**Gambar 2.2.2 Kerangka Pemikiran**



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2013) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna terhadap jenis-jenis individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Metode ini membantu peneliti melihat peran *women peacekeepers* dalam isu *sexual exploitation abuse* di Republik Demokratik Kongo yang merupakan masalah sosial. Dalam menjelaskan masalah tersebut, peneliti menggunakan alur deduktif, yang berarti penjelasan yang di paparkan dimulai dari umum ke khusus.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisa kasus karena peneliti melihat perkembangan kasus *sexual exploitation abuse* di Republik Demokratik Kongo secara mendalam setelah dan sebelum *women peacekeepers* mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai langkah untuk pengumpulan data berdasarkan waktu yang tertera yang sesuai dengan pertanyaan penelitian untuk mengetahui efektifitas keterlibatan *women peacekeepers* dalam menyelesaikan masalah *sexual exploitation and abuse* (SEA) di Republik Demokratik Kongo.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus dalam menjelaskan peran *women peacekeepers* dalam menyelesaikan masalah SEA di Republik Demokratik Kongo di tahun 2017-2019 karena dalam kurun waktu tersebut adanya peningkatan jumlah Wanita sebagai korban dari SEA. Maraknya kasus SEA yang terjadi di operasi perdamaian

melahirkan *zero tolerance policy*. Kebijakan tersebut merupakan upaya PBB untuk mengurangi kasus tersebut tetapi keadaan tersebut tidak sesuai fakta adanya kebijakan tersebut semakin meningkatkan jumlah kasus SEA. Penelitian ini menggunakan teori dan konsep, yaitu feminisme liberal sebagai penjelasan *zero tolerance policy* yang menggunakan pendekatan feminis dalam pembuatan kebijakannya, sekaligus respons dari *militer masculinity* yang cenderung menciptakan batasan pada keterlibatan wanita dalam operasi perdamaian. Peran *women peacekeepers* dalam operasi perdamaian merupakan cerminan dari fenomena feminis liberal dalam menempatkan posisi dan peranan wanita dalam militer dan sosial yang ditemukan bahwa apabila kebijakan yang diciptakan tidak ramah gender dan cenderung *male-domination* akan menciptakan masalah khususnya SEA.

Penulis juga melihat kerja sama PBB dan aktor NGO dalam memaksimalkan peran *women peacekeepers* dengan kerja sama PBB dengan berbagai agensi yang dijelaskan dengan teori jejaring kelembagaan, karena struktur pelebagaan mempengaruhi tercapainya tujuan bersama untuk membantu menciptakan kestabilan perdamaian khususnya dalam pencegahan dan pengurangan kasus SEA di Republik Demokratik Kongo.

### 3.3 Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang didapatkan oleh seorang peneliti tidak langsung dari objeknya atau pihak kedua, baik secara lisan maupun tulis. Peneliti memperoleh data melalui dokumen artikel, jurnal, *website* resmi PBB. Dimulai dari laporan *UN conduct mission* sebagai acuan untuk melihat status berdasarkan misi, kategori personel militer, dan kategori usia korban SEA. *UN Peacekeeping dan UN women* adalah acuan penulis untuk melihat data perkembangan *zero tolerance policy* dan pengaruhnya terhadap peran *women peacekeepers* dalam penyelesaian SEA di Republik Demokratik Kongo.

Selanjutnya penulis menggunakan referensi dari berbagai NGO sebagai pelengkap data dalam kasus SEA. Penulis telah menganalisis dan mengambil data dari berbagai NGO, di antaranya adalah *Redress, Save the children, Amnesty*

*International, Panzi Foundation, Physicians for Human Rights (PHR)*. Data yang dilampirkan berisi laporan, rekomendasi, dan program yang dilakukan terkait pencegahan dan penanganan isu SEA. Hal ini dilakukan penulis dengan pertimbangan untuk melihat sudut pandang yang lebih netral dalam penelitian ini sebagai penghormatan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, khususnya dalam isu SEA yang akan dipaparkan oleh penulis sesuai dengan penulisan akademik dan secara *audio-visual materials*, karena dapat membantu penulis untuk menginterpretasi keadaan sekitar lebih dalam dari hasil video wawancara korban dengan tambahan melihat ekspresi, tempat, dan keadaan pada saat itu mengingat penelitian yang dilakukan peneliti terbatas oleh jarak. Video tersebut diakses penulis melalui *Youtube* dan artikel yang melampirkan video seperti *AP News*.

### **3.4 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka membantu penulis mendapatkan paparan data dan informasi terkait peran *women peacekeepers* sebagai respons dalam menghadapi *sexual abuse exploitation* di Republik Demokratik Kongo melalui buku, artikel, jurnal, dokumen, situs resmi PBB, dan berita elektronik. Sumber data utama dari penelitian ini adalah situs resmi PBB, yaitu laporan *conduct in UN field mission* dan agensi terkait seperti *Redress, Save the children, Amnesty International, Panzi Foundation, Physicians for Human Rights (PHR)* yang diperoleh penulis dengan cara mengakses data melalui internet melalui situs resmi *website*.

Penulis juga melakukan *literature review* berbagai buku dan jurnal sebagai acuan utama untuk mengetahui landasan teori konsep dan studi kasus dan melakukan beberapa peninjauan secara materi visual yang dikumpulkan dari video wawancara korban, seperti dari dokumentasi dari situs resmi berita, yaitu *AP News*.

### **3.5 Teknik Analisis data**

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah induktif yaitu paragraf dipaparkan secara melampirkan fakta-fakta yang mengarah pada kesimpulan umum yang membantu penulis untuk membuat pengamatan khusus. Penulis melakukan analisis data dengan menganalisis kasus terlebih dahulu, yaitu SEA di Republik Demokratik Kongo kemudian paparan data penulis bagi dalam periode 2017, 2018, dan 2019 yang divalidasi penjelasannya menggunakan tiga teori, yaitu feminis liberal, maskulintas militer, dan teori jejaring kelembagaan.

## IV. PEMBAHASAN

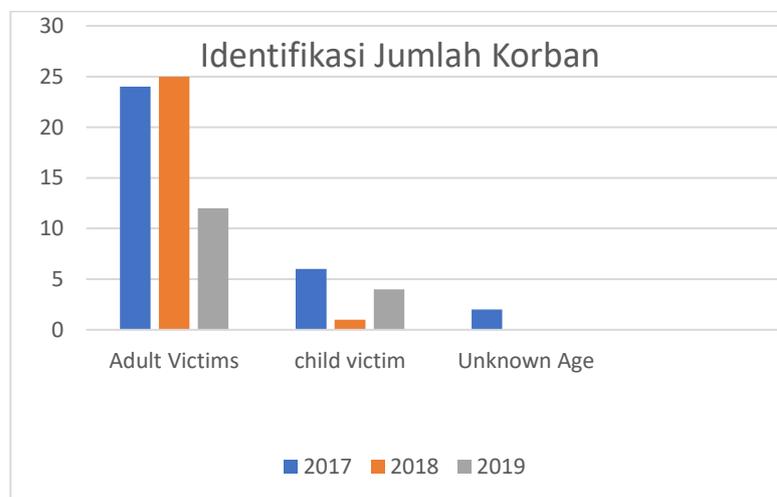
### 4.1 Maskulinitas Militer dalam Peningkatan Kasus SEA di Republik Demokratik Kongo.

Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam kerusuhan dan ketidakstabilan. Kasus SEA di Kongo selalu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, tetapi ada peningkatan terhadap angka kekerasan seksual sejak dimulainya konflik pada tahun 1990-an hingga sekarang. PBB mengartikan *sexual exploitation* sebagai segala bentuk penyalahgunaan atau percobaan atas posisi kerentanan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan untuk tujuan seksual tidak terbatas pada keuntungan moneter, sosial, atau politik dari eksploitasi (Lee, 2019), dan *sexual abuse* atau kekerasan seksual sebagai instruksi fisik yang mengancam sifat seksual, baik dengan paksaan atau di bawah kondisi pemaksaan yang tidak setara (Lee, 2019).

Paparan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa *sexual abuse exploitation* atau SEA merupakan tindakan yang mencakup keterlibatan pasukan perdamaian dalam seks transaksional dan kekerasan seksual (Karim, 2016). SEA dalam operasi perdamaian merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut oleh PBB, selain itu kejadian dari pelanggaran tersebut memberikan trauma kepada korban. Kejadian tersebut juga telah menciptakan batasan komunikasi dan interaksi terhadap pasukan perdamaian menciptakan ketidakpercayaan antara warga lokal dan misi perdamaian tersebut. SEA juga membuat misi perdamaian terlihat kurang sah dan tidak menguntungkan.

Laporan yang dirilis dari jurnal Sabrina Karina SEA lebih sering terjadi di wilayah-wilayah dengan tingkat kematian pertempuran rendah, sedangkan dalam

operasi yang lebih besar, baru, negara yang kurang berkembang yang menjadi tuan rumah misi dalam operasi di mana konflik melibatkan tingkat kekerasan sosial yang tinggi (Karim, 2016) Mengumpulkan dari berbagai berita seperti *ap news*, *human right watches report*, *abc news*, dan *The New York times*, *sexual exploitation abuse* di Republik Demokratik Kongo merupakan kasus terbesar di dunia muncul sejak tiga belas tahun yang lalu dengan jumlah lebih dari tujuh ratus kasus atau sepertiga dari 43 tuduhan yang dibuat oleh negara-negara lain pada tahun 2017 (ABC Radio National, 2021). Untuk memperjelas informasi, penulis juga mengambil data dari PBB sebagai aktor utama dalam kasus ini.

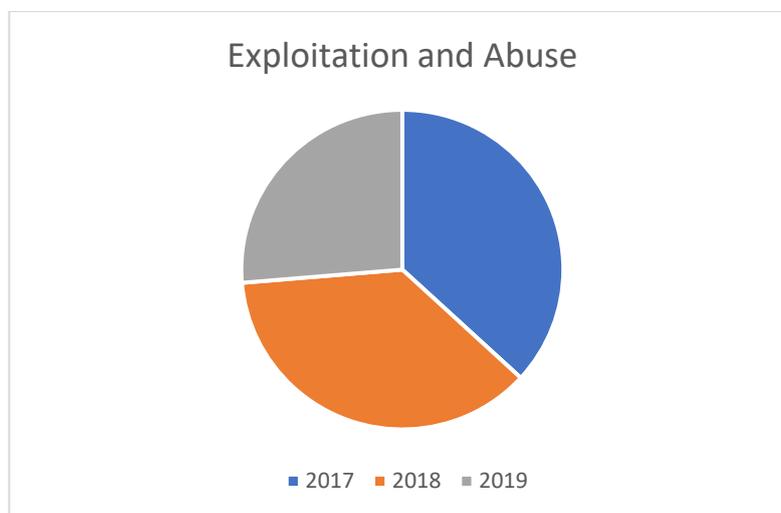


Gambar 4.1.1 Identifikasi jumlah korban.

Sumber: UN Conduct Mission.

Melihat data dari *UN conduct in UN field mission*, dihitung dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ada sekitar 57 jumlah tuduhan dilihat dari kategori jumlah korban dan 73 jumlah korban yang diidentifikasi terkait kasus SEA yang terjadi di MONUSCO. Jumlah kasus pada tahun 2017 yaitu sejumlah tiga puluh korban, di antaranya anak-anak di bawah umur berjumlah enam orang dan 24 orang dewasa, pada tahun 2018 27 orang, 25 dewasa dan dua orang anak-anak. Sedangkan pada tahun 2019, terdapat enam belas kasus menyangkut orang dewasa dan empat orang menyangkut anak-anak. Sedangkan apabila dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh PBB hanya sekitar dua puluh kasus dari tahun 2017, 2018, dan 2019 yang

mampu ditangani oleh PBB dalam bentuk reparasi dan satu kasus tertunda oleh PBB.



Gambar 4.1.2 Jenis Tuntutan SEA di Republik Demokratik Kongo 2017-2019.

Sumber: UN Conduct Mission.

Berdasarkan laporan di atas, berbagai jenis tuduhan antara *exploitation* dan *abuse* dengan jumlah terbanyak. Pada tahun 2017, dengan jumlah tiga kasus *abuse* dan tujuh belas *exploitation* dengan dua kasus. Pada tahun 2018, ada tiga kasus dengan kasus *abuse*, tujuh belas *exploitation*, dan satu kasus mengenai keduanya (*abuse* dan *exploitation*). Pada tahun 2019, jumlah kasus *abuse* ada sembilan dan dua kasus *exploitation*. Pelaku kasus tersebut mengalami peningkatan jumlah insiden yang dikaitkan dengan keterlibatan FARD pada tahun 2017 sebanyak 28% dan polisi nasional Republik Demokratik Kongo sebanyak 109% (UN Conduct Mission, 2021). Lebih dari sepertiga dari mereka yang diserang secara seksual oleh anggota polisi nasional, dengan signifikansi korban adalah anak-anak dalam 41% pelanggaran dilakukan oleh anggota militer asing termasuk *male peacekeepers* (FARDC) di dalamnya dan *Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo* di 42 % dari yang dilakukan oleh petugas kepolisian nasional (UN Conduct Mission, 2021) Pada tahun 2019 tercatat laporan penambahan lima belas kasus menjadikan jumlah peningkatan kasus di MONUSCO.

Tabel 4.1.1 Rangkuman kalkulasi demografis kekerasan seksual berdasarkan usia dan wilayah di provinsi Republik Demokratik Kongo.

Province	Provincial Population	No. of Women of Reproductive Age	Absolute No. of Occurrences			Rates per 1000 Women of Reproductive Age		
			Intimate Partner Sexual Violence	History of Rape	Rape in Preceding 12 Mo	Intimate Partner Sexual Violence	History of Rape	Rape in Preceding 12 Mo
Annualre Sanitaire calculations								
Bandundu	7.228.000	1.592.537	455.207	154.883	22.691	286	97	14
Bas-Congo	4.098.000	902.908	100.960	78.005	6.504	112	86	7
Équateur	6.602.000	1.454.611	606.200	219.982	94.604	417	151	65
Kasai-Occidental	4.616.000	1.017.036	252.678	140.072	7.749	248	138	8
Kasai-Oriental	5.610.000	1.236.045	307.089	82.232	9.418	248	67	8
Katanga	9.297.000	2.048.397	340.179	164.887	28.784	166	80	14
Kinshasa	7.596.000	1.673.618	202.761	207.512	43.619	121	124	26
Maniema	1.730.000	381.169	93.305	55.818	19.050	245	146	50
Nord-Kivu	4.947.000	1.089.967	260.402	223.262	73.387	239	205	67
Orientale	7.221.000	1.590.995	310.454	242.536	59.779	195	152	38
Sud-Kivu	4.281.000	943.228	143.758	120.709	41.811	152	128	44
Total	63.226.000	13.930.511	3.072.993	1.689.898	407.396	2.429	1.374	341

Sumber: Am J Public Health.

Keterkaitan kasus SEA di Republik Demokratik Kongo sejauh ini banyak terjadi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan *American journal Health* (2011), tabel di atas memaparkan bahwa dari sebelas provinsi jumlah wanita yang mengalami kekerasan seksual meningkat sebesar 63.27 menjadi 66.97 juta (Peterman, 2011) Pada provinsi Orientale serta Nord-Kivu dan É quateur, wanita yang mengalami SEA berjumlah sekitar 1,69 hingga 1,80 juta wanita (Peterman, 2011) berusia dari 15 hingga 59 tahun.

Menurut penelitian ini dua belas bulan sebelum survei, jumlah wanita yang diperkosa berkisar dari 407397 hingga 433785 di wilayah tersebut yang menjadikan provinsi Nord-Kivu dan É quateur sebagai provinsi tertinggi dalam kasus SEA seumur hidup, sedangkan untuk kasus SEA terendah ditemukan di provinsi Bas-

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Krisis konflik di Republik Demokratik Kongo telah mengalami perubahan dinamika dalam kurun waktu yang lama dan menciptakan banyak isu kekerasan, khususnya SEA dengan melibatkan *male peacekeepers* operasi perdamaian MONUSCO yang terjadi akibat melekatnya budaya maskulinitas militer. SEA merupakan isu yang sangat kompleks sehingga dalam upaya penyelesaiannya membutuhkan dan melibatkan banyak pihak, upaya PBB menyelesaikan kasus SEA berfokus pada dua hal, pertama penekanan pada kebijakan ramah gender, yaitu *zero tolerance policy* menggunakan teori feminis liberal yang diterapkan pada tugas *women peacekeepers* melalui *civilian peacekeepers* dan kedua adalah melalui kerjasama yang melibatkan NGO termasuk badan PBB lain sebagai partner dalam menciptakan program sekaligus menjalankan agenda dalam upaya penyelesaian kasus SEA yang dikaji dengan teori jejaring kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian peran *women peacekeepers* dan kerjasama jejaring bersifat efektif melalui program-program yang di agendakan seperti melalui pendidikan, kesenian, pendekatan emosional secara personal, dan secara teknologi yang menciptakan penurunan kasus SEA yang signifikan dari tahun 2017- 2019 di MONUSCO.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, penulis akan memberikan beberapa saran terkait peran *women peacekeepers* dalam penyelesaian *sexual exploitation abuse* (SEA) di Republik Demokratik Kongo:

1. Sebaiknya ada evaluasi dari PBB sebagai organisasi internasional untuk lebih menekankan peran *women peacekeepers*, khususnya pada program nonmiliter sesuai dengan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 yang berdasarkan hasil penelitian penulis sebagian besar program masih bertumpu pada kegiatan militer.
2. Sebaiknya PBB melakukan peningkatan kerja sama terhadap NGO, khususnya dalam penanganan SEA dengan melibatkan *women peacekeepers* sebagai salah eksekutor utama dalam program secara keseluruhan.
3. Sebaiknya PBB menciptakan evaluasi terkait struktur dan sistem yang bergerak dalam PBB, karena dari hasil penelitian penulis, PBB tidak memiliki legalitas hukum yang kuat untuk menghukum pelaku SEA yaitu *male peacekeepers* sehingga penting untuk melakukan reformasi dalam ranah tersebut sebagai upaya penanganan SEA pada operasi perdamaian.
4. Sebaiknya rekomendasi yang diberikan oleh beberapa NGO, baik lokal maupun internasional dapat ditanggapi oleh PBB secara formal karena tujuan utama dari PBB adalah mencapai perdamaian sosial sehingga keamanan individu merupakan urgensi utama untuk mencapai tujuan tersebut, dari hasil penelitian penulis tidak menemukan kesempatan tersebut dari PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alchin, Angela Nicole. (2015). *Are Women Making a Difference in Peacekeeping Operations? Considering the Voices Of South African Women Peacekeepers. South Africa*. Stellenbosch University Publications.
- Amnesty International. (2004). *Democratic Republic of Congo: Mass rape- time for remedies - annual report*. Africa. Amnesty International publication.
- AP News. (2017). *UN peacekeepers in Congo hold record for rape, sex abuse*. Dipetik pada April 10, 2021, dari <https://apnews.com/article/united-nations-pakistan-africa-sexual-abuse-international-news>
- AP News. (2017). *UN peacekeepers in Congo hold record for rape, sex abuse*. Dipetik pada April, 10, 2021, dari <https://apnews.com/article/united-nations-pakistan-africa-sexual-abuse-international-news>
- AP News. (2017). *UN peacekeepers in Congo hold record for rape, sex abuse*. Dipetik pada April 10, 2021, dari <https://apnews.com/article/united-nations-pakistan-africa-sexual-abuse-international-news>
- Bale, Lucy. (2013). *Liberal Feminism*. John Wiley and Sons LTD. America.
- Burke, Roisin. (2014). *Shamming the State: Sexual Offences by UN Military Peacekeepers and the Rhetoric of Zero Tolerance*. UK. Plagrave Macmillan.
- Bakti, Shirin. (2019). *Sexual Exploitation and Abuse by UN peacekeepers*. Sweden. CEI International Affairs .
- BBC NEWS. (2017). Dipetik pada Oktober 26, 2021, dari <https://www.bbc.com/news/world-43046554>
- Conduct in UN field Missions. (2021). *Sexual Exploitation and Abuse graphic*. Dipetik pada April 10, 2021, dari <https://conduct.unmissions.org/sea-victims>
- Data.worldbank.org. (2021). Dipetik pada September 28 , 2021, dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CD>
- Data.UN PEACEKEEPERS. (2018) Dipetik pada November 29, 2021, dari <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping>
- Doctine, Capstone. (2008). *Principels and Guidelines*. New York. Departement of Peace Keeping Operation.

- Enyew, Bimber Eyayu. (2018) . *Liberal Feminism: Assessing its compatibility and applicability in Ethiopia context*. Ethiopia. International Journal of Sociology and Anthropology.
- Goodin, Robert E. (2008). *The Oxford Handbook of Political Institutions*. Oxford. OUP OXFORD.
- Hutabarat, Leonard F. (2017) . *Indonesian Female Peacekeepers Peacekeeping Mission*. Jakarta. BPKK Republic Indonesia.
- Hendric, Cheryl. (2017). *Progress and Challenges in Implementing the Women, Peace and Security Agenda in the African Union's Peace and Security Architecture*. Council for the Development of Social Science Research in Africa Publications.
- Hearthcote, Gina. (2014). *Rethinking Peacekeeping Gender Equality and Collective Security*. Palgrave Macmillan. UK.
- Jett, Dennis C. (2019). *Why Peacekeeping Fails*. USA. Palgrave Macmillan.
- Jennings, Kathleen M. (2011). *Women Participation in peacekeeping operations : agents of change or stranded symbols?.Norwegia*.Norwegian Peacebuilding Resource center Publications.
- Kanetake, Machiko. (2010). *Whose Zero tolerance counts? Reassessing A zero tolerance policy against sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers*. London. Taylor and Francis.
- Korsnell, Annica. (2011). *Gendered Practices in institution of Hegemonic masculinity-reflection from feminist standpoint theory*. International Feminist Journal Politics. Publications.
- Kovatch, Bonnie. (2016). *Sexual Exploitation and abuse in UN peacekeeping Missions: A case study of MONUC and MONUSCO*. US. Routledge.
- MONUSCO. *MONUSCO Campaigns Againsts Sexual Violence in Province Orientale*. (2017). Dipetik pada Febuari 21, 2022, dari <https://monusco.unmissions.org/node/100043274>
- Peterman, Amber. (2011). *Estimates and Determinants of Sexual Violence Againsts Women in the Democratic Republic Congo*. America. Am J Public Health.
- Paramasatya, Satwika. (2015). *Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian MONUSCO*. Semarang. Arsip Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Diponegoro.
- PBB NEWS. (2018). *Women In Peacekeeping*. Dipetik pada Juli 12, 2021, dari <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping>.
- Redress. (2016). *Sexual Exploitation and abuse in peacekeeping operation. improving victims' access to reparation, support and Assistance*.London. Redress publication.

- Rodriguez, Roberto Miguel. (2015). *UNAMID and MONUSCO, the Two Most Expensive UN Peacekeeping Operations : How Close are they to achieve their Objectives?.* USA.Lulu Publisher.
- Soreson, David. (2005). *The Politics of Peacekeeping in The Post Cold War Era.* London. Frank Cass.
- S. Lee dan S. (2001). Bartels. *They put a few coins in your hand to drop a baby in you: A study of Peacekeeper-Fathered children in Haiti.*United Kingdom. Routledge.
- Salvà, Catalina Lopez. (2015). *Sexual Exploitation and Abuse by UN peacekeepers.* Barcelona.CEI International Affairs Publications.
- Save the children. (2011) . *No one to turn to.*United Kingdom.*Save the children publication.*
- Taufik. (2017). *Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik.* Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
- The Guardian. (2018). *Fourty Eight Woman raped every hour in Congo, Study Finds.* Diakses pada Maret 11, 2021, dari <https://www.theguardian.com/world/2011/may/12/48-women-raped-hour-congo>
- UN TRUST FUND. Annual Report. (2017). United Nations Publication.
- UN Refugee Agency. (2018). Dipetik Juli 13, 2021, dari pada <https://www.unhcr.org/our-fight-against-sexual-exploitation-abuse-and-harassment.html>
- United Nation Peacekeeping. (2021). Gender. Dipetik Mei 19, 2021, dari <https://peacekeeping.un.org/en/gender>
- United Nation Peacekeeping. (2017) . *MONUSCO Launches projects to assist victims of sexual exploitation and abuse.* Dipetik, Februari 23, 2022 dari <https://peacekeeping.un.org/en/monusco-launches-projects-to-assist-victims-of-sexual-exploitation-and-abuse>
- United Nation Peacekeeping. (2017). *Raising Awareness on Sexual Exploitation and Abuse in the North Kivu Community.* Dipetik Februari 23, 2022, dari <https://peacekeeping.un.org/en/raising-awareness-sexual-exploitation-and-abuse-north-kivu-community>
- UN Peacekeeping. (2019). *Tweleve MONUSCO military focal points trained in the prevention of sexual exploitation and abuse in Bunia.* Dipetik Februari 23, 2022, dari pada <https://peacekeeping.un.org/en/twelve-monusco-military-focal-points-trained-prevention-of-sexual-exploitation-and-abuse-bunia>
- UN Peacekeeping. (2017) *MONUSCO supports South African Defence Forces' Efforts to prevent sexual exploitation and abuse in a first of its kind training.* Dipetik Februari 23, 2022, dari <https://peacekeeping.un.org/en/monusco-supports-south-african-defence-forces-efforts-to-prevent-sexual-exploitation-and-abuse-first>

- UN Peacekeeping. (2018). *Sexual Exploitation and abuse allegations: what does presumption of innocence means for the under investigation?*. Dipetik Febuari 23, 2022, dari pada <https://peacekeeping.un.org/en/sexual-exploitation-and-abuse-allegations-what-does-presumption-of-innocence-means-under>
- UN Peacekeeping. (2018). *UN Policewoman recognized for 'speaking up and speaking out' on behalf of the vulnerable*. Dipetik Febuari, 23, 2022, dari <https://peacekeeping.un.org/en/un-news/un-policewoman-recognized-speaking-and-speaking-out-behalf-of-vulnerable>
- UN Peacekeeping. (2020). Lila Budiyanti: "*Serving as a peacekeepers is an Honor for Me and for my Country, Indonesia*". Dipetik Febuari, 23, 2022, dari, <https://peacekeeping.un.org/en/lilia-budiyanti-serving-peacekeeper-is-honor-me-and-my-country-indonesia>
- UN Peacekeeping. (2019). *Remarks to Security Council on Women in Peacekeeping*. Dipetik Febuari, 23, 2022, dari <https://peacekeeping.un.org/en/remarks-to-security-council-women-peacekeeping>
- UN News. (2018). Dipetik November, 29, 2021, dari <https://www.unv.org/Success-stories/Women-peacekeeping-powerful-asset-peace-and-security-West-and-Central-Africa>
- UN News. Dipetik November, 29, 2021, dari <https://monusco.unmissions.org/en/monusco-campaigns-against-sexual-violence-province-orientale>
- UN News. Dipetik November, 29, 2021, dari <https://monusco.unmissions.org/en/search/node/Women%20Peacekeepers>
- Wiker, Anna-Maria. (2016). *Sexual Exploitation and Abuse in U.N PEACEKEEPING. TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY*. Estonia. Departement of International Relations of Estonia University Publications.